



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA

MENGENAI

PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan tersebut dengan memberikan kemudahan perjalanan masuk antara pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Republik Bolivarian Venezuela ke negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara Para Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler, di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga inti mereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar atau Misi Konsuler Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah negara Pihak tersebut.

PASAL 3
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan pemilik paspor diplomatik atau dinas dimaksud dari kewajiban untuk mematuhi hukum Pihak negara penerima, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai masuk, tinggal dan keluar warga negara asing.
2. Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal orang yang berada di wilayah negaranya apabila dianggap orang tersebut tidak dikehendaki atau dianggap dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau keamanan nasional. Dalam hal ini, masing-masing Pihak wajib memberitahukan kejadian ini kepada perwakilan diplomatik atau konsuler Pihak lainnya.

PASAL 5
PERSYARATAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas wajib masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 6
PASPOR HILANG ATAU RUSAK

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah

tersebut, melalui misi diplomatik atau konsuler negaranya, untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsuler bersangkutan wajib, sesuai dengan peraturan di negaranya, mengeluarkan paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara tersebut, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara penerima.

PASAL 7

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini, wajib diberitahukan melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya, setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kebijakan-kebijakan tersebut.

PASAL 8

PERTUKARAN CONTOH PASPOR

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, contoh paspor-paspor diplomatik dan dinasnya, 30 (tiga puluh) hari sebelum Persetujuan ini berlaku.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau dinas yang baru, serta modifikasi terhadap apa yang telah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan satu sama lainnya secara tertulis, melalui saluran diplomatik,

mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 9

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 10

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi, apabila dianggap perlu, melalui persetujuan bersama antara Para Pihak. Perubahan atau modifikasi tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan ayat 1 dari Pasal 11 Persetujuan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 11

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

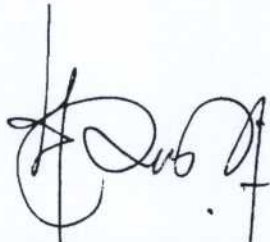
1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing prosedur internalnya, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Nusa Dua, Bali pada hari kesebelas bulan Juni, tahun 2013, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Kementerian Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA**



DAVID VELASQUEZ CARABALLO

Wakil Menteri untuk Asia, Timur Tengah
dan Oceania Kementerian Kedaulatan
Rakyat untuk Urusan Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela hereinafter referred to as the "Parties";

RECOGNIZING the existing bonds of friendship between both countries;

DESIRING to further strengthen their friendly relations by facilitating the entry of holders of diplomatic or service passports of the Republic of Indonesia and the Bolivarian Republic of Venezuela into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing law and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows;

**ARTICLE 1
VISA EXEMPTION**

The nationals of either Party, holders of diplomatic or service passports, shall not be required to obtain visa to enter, transit, and stay in the territory of the other Party for a period no longer than 30 (thirty) days from the day of entry.

ARTICLE 2
VISA FOR MEMBER OF A DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

The nationals of either Party holding a diplomatic or service passports assigned as a member of a diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their immediate family members shall be required to obtain appropriate entry visas from the Embassy or Consular Mission of the other Party prior to the entry.

ARTICLE 3
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic or service passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the day of entry into the territory of the other Party.

ARTICLE 4
THE RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement does not exempt the holder of the mentioned types of passport of the obligation to respect the legal ordinance of the receiving state, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreign nationals.
2. Each Party reserves the right to impede the entry or shorten the duration of stay in its territory of persona non grata or persons likely to endanger public peace, public order, public health or national security. In such case, either Party shall communicate this event to the diplomatic or consular representation of the other Party.

ARTICLE 5
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

The nationals of the Party holding diplomatic or service passports shall enter or exit the territory of the other Party through check points open for international passenger traffic.

ARTICLE 6
LOSS OR DAMAGE OF PASSPORTS

In case of a national of either Party loses or damage his/her diplomatic or service passports in the territory of the other Party, he/she shall inform the competent authorities of the receiving country, through the diplomatic or consular mission representing the country of origin, in order to take the appropriate measures. The diplomatic or consular mission concerned shall, in compliance with the legislation of its country, issue a new passport or travel document to the aforementioned national, and inform such issuance to the competent authorities of the receiving country.

ARTICLE 7
SUSPENSION

1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order, or public health.
2. The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party at least 7 (seven) days prior to the expected date of such measures through diplomatic channels.

ARTICLE 8
EXCHANGE OF THE SPECIMENS OF PASSPORT

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels the specimens of their diplomatic and service passports within 30 (thirty) days prior to the entry into force of this Agreement.
2. In case of the introduction of new diplomatic or service passports, as well as, modifications to the existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, of any changes no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

ARTICLE 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 10
AMENDMENTS

This Agreement may be amended or modified, if deemed necessary, by mutual written consent of the Parties. Such amendments or modifications shall enter into force in accordance to the provision of paragraph 1 Article 11 of this Agreement, and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the last written notification by which the Parties inform each other, through

diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be renewed automatically for further period of 5 (five) years, unless either Party decides to terminate it by giving written notification to the other Party, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to the expected date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Nusa Dua, Bali on the 11th day of June, of the year 2013, in two originals, each in the Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF
INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI

Director General
for America and Europe of the
Ministry of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VENEZUELA**



DAVID VELASQUEZ CARABALLO

Vice Minister for Asia, Middle East
and Oceania of the Ministry of
People's Power for Foreign Affairs



REPUBLIK INDONESIA

**ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PARA
LA EXENCIÓN DE VISADO PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS O DE SERVICIO**

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados las "Partes";

RECONOCIENDO los vínculos de amistad que existen entre ambos países;

DESEOSOS de reforzar aún más las relaciones de amistad al facilitar el ingreso de titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio de la República de Indonesia y la República Bolivariana de Venezuela a sus respectivos países;

DE CONFORMIDAD CON las leyes y reglamentos vigentes de los países respectivos;

HAN ACORDADO lo siguiente:

**ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISADO**

Los ciudadanos de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio, no estarán obligados a obtener el visado para ingresar, transitar y

permanecer en el territorio de la otra Parte por un período no superior a treinta (30) días a partir de la fecha de ingreso.

ARTÍCULO 2

VISADO PARA MIEMBROS DE UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA O CONSULAR

Los ciudadanos de cualquiera de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio, que hayan sido designados como miembros de una misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluso sus familiares más directos, deberán obtener el visado de entrada necesario en la Embajada o Misión Consular de la otra Parte antes del ingreso.

ARTÍCULO 3

DURACIÓN DE LA VALIDEZ DEL PASAPORTE

La duración de la validez del pasaporte diplomático o de servicio de los ciudadanos de cualquiera de las Partes será de al menos seis (6) meses a partir de la fecha de ingreso al territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 4

DERECHOS DE LAS AUTORIDADES

1. El presente Acuerdo no exime a los titulares de los mencionados tipos de pasaportes de la obligación de respetar el ordenamiento jurídico del Estado receptor, en particular, aunque no exclusivamente, la obligación de respetar las leyes y reglamentos relativos al ingreso, estadía y salida de los ciudadanos extranjeros.

2. Cada Parte se reserva el derecho a impedir el ingreso o a reducir la duración de la estadía en su territorio de una persona declarada non grata o de las personas que puedan poner en peligro la paz pública, el orden público, la salud pública o la seguridad nacional. En ese caso, cualquiera de las Partes comunicará este hecho a la representación diplomática o consular de la otra Parte.

ARTÍCULO 5

CONDICIONES PARA EL INGRESO Y LA SALIDA

Los ciudadanos de una de las Partes, titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio, ingresarán y saldrán del territorio de la otra Parte a través de puntos de control abiertos al tráfico internacional de viajeros.

ARTÍCULO 6

PÉRDIDA O DAÑO DE LOS PASAPORTES

En caso de que un ciudadano de cualquiera de las Partes pierda o dañe su pasaporte diplomático o de servicio en el territorio de la otra Parte, deberá informar a las autoridades competentes del país receptor, a través de la misión diplomática o consular que representa al país de origen, con el fin de tomar las medidas pertinentes. La misión diplomática o consular en cuestión, de conformidad con la legislación de su país, expedirá un nuevo pasaporte o documento de viaje al ciudadano antes mencionado e informará dicha expedición a las autoridades competentes del país receptor.

ARTÍCULO 7

SUSPENSIÓN

1. Cualquiera de las Partes podrá suspender, temporal, parcial o completamente, la implementación del presente Acuerdo por motivos de seguridad nacional, orden público o salud pública.
2. La aplicación así como la terminación de las medidas establecidas en el apartado 1 del presente artículo serán debidamente informadas a la otra Parte por vía diplomática con al menos siete (7) días previos a la fecha establecida para dichas medidas.

ARTÍCULO 8

INTERCAMBIO DE LOS EJEMPLARES DE PASAPORTES

1. Las Partes intercambiarán a través de los canales diplomáticos los ejemplares de sus pasaportes diplomáticos o de servicio en un período de treinta (30) días anteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. En caso de introducción de nuevos pasaportes diplomáticos o de servicio, así como de modificaciones a los ya existentes, las Partes se informarán mutuamente por escrito, a través de los canales diplomáticos, acerca de cualquier cambio a más tardar treinta (30) días antes de su introducción oficial.

ARTÍCULO 9
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier disputa entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo será resuelta amistosamente a través de consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 10
ENMIENDAS

El presente Acuerdo se podrá enmendar o modificar, si se considera necesario, mediante consentimiento mutuo de ambas Partes comunicado por escrito. Estas enmiendas o modificaciones entrarán en vigor de conformidad con las disposiciones del apartado 1 del Artículo 11 del presente Acuerdo, y formarán parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última notificación por escrito mediante la cual una Parte informa a la otra, por vía diplomática, sobre el cumplimiento de todos los requisitos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con lo estipulado en sus respectivos procedimientos internos.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigencia por un período de cinco (5) años y se renovará automáticamente por otros cinco (5) años, salvo que cualquiera de las Partes decida terminarlo, mediante notificación por escrito a la otra Parte,

por vía diplomática, con treinta (30) días de antelación a la fecha establecida para su terminación.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

HECHO en Nusa Dua, Bali el once de junio de 2013, en dos originales, redactados en los idiomas indonesio, castellano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de discrepancia en la interpretación, la versión inglesa prevalecerá.

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DE INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI

Director General por
América y Europa del Ministerio para
la Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA**



DAVID VELASQUEZ CARABALLO

Vice Ministro para Asia, Medio Oriente
y Oceanía del Ministerio del Poder
Popular para la Relaciones Exteriores